



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



2021-2026
RENSTRA
Rencana Strategis



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Jln. Tanjung Api No. 7

Email : BakesbangpolSultengProv@gmail.com

Website : www.Bakesbangpol.sultengprov.go.id

Telepon/Fax : (0451) 421954/453350



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Sulawesi Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
9. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinir oleh instansi Pemerintah.

11. Rencana . . .

11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi dan prioritas pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
12. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/ Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Sulawesi Tengah untuk Periode 20 (dua puluh) tahun, memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
17. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

19. Bersifat . . .

19. Bersifat indikatif adalah data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
20. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

BAB II

KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
 - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
 - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN
 - h. BAB VIII : PENUTUP.
- (2) Dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV . . .

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 17 Januari 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 17 Januari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOH. FAISAL MANG
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 806

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. YOPIE, M.P., SH., MH

Pembina Tk 1, IV/b

Nip. 19780525 199703 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatNya Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu dibutuhkan integrasi sinergis antara kemampuan sumberdaya manusia, sarana prasarana dan sumberdaya lain untuk menjawab peluang dan tuntutan perkembangan, Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan agar OPD menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahun.

Renstra ini berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan SKPD, isu-isu strategis berdasarkan tupoksi, penyajian visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, penutup. Renstra 2021-2026 ini merupakan proses pembangunan 5 tahunan yang tidak terlepas dari proses pada tahun-tahun sebelumnya sehingga secara keseluruhan berisikan program dan kegiatan lanjutan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian penyusunan Dokumen RENSTRA ini, diucapkan terima kasih. Semoga upaya dan partisipasi tersebut merupakan salah satu wujud nyata pengabdian kepada Masyarakat, Bangsa dan Negara.

Palu, 12 Juni 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. A R F AN, M.Si
Bembina Utama Madya
Nip. 19716091990121001

DAFTAR ISI

Surat Keputusan Pergub Tentang Renstra Perangkat Daerah 2021-2026	ii
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II Gambaran Pelayanan Bakesbangpol Prov. Sulteng	10
2.1. Struktur, Tugas dan Fungsi dan Perangkat Daerah ..	10
2.1.1. Eselonisasi Jabatan Struktural	11
2.1.2. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	12
2.2. Sumber Daya Bakesbangpol Prov Sulteng	27
2.2.1. Sumber Daya Manusia	27
2.2.2. Asset/Modal OPD	28
2.3. Kinerja Pelayanan Bakesbangpol Prov Sulteng	31
a. Pelayanan Internal	31
b. Pelayanan Eksternal	31
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bakesbangpol Prov Sulteng	54
a. Faktor Internal	54
b. Faktor Eksternal	55
BAB III Permasalahan Isu-Isu Strategis Bakesbangpol Prov. Sulteng	57
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	57
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	58
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	60

	3.4. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup	62
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	62
BAB IV	Tujuan dan Sasaran	64
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bakebangpol Prov. Sulteng	64
BAB V	Strategi dan Arah Kebijakan	74
	5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Bakesbangpol Prov. Sulteng	74
BAB VI	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	77
	6.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	77
	6.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	77
	6.1.2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	78
	6.1.3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	78
	6.1.4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	79
	6.1.5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	78
	6.1.6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	79
BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	99
BAB VIII	Penutup	101

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar Pegawai Bakebangpol Prov. Sulteng Menurut Pendidikan	26
Tabel 2.2	Daftar Pegawai Bakebangpol Prov. Sulteng Menurut Kepangkatan	27
Tabel 2.3	Daftar Sarana dan Prasarana	27
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bakebangpol Prov. Sulteng Politik Daerah Tahun 2016-2021	32
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bakebangpol Prov. Sulteng Tahun 2016-2021	35
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Bakebangpol Prov. Sulteng Periode 2021-2026	57
Tabel 3.2	Telaahan Visi dan Misi, KDH/WKDH	59
Tabel 3.3	Telaahan Tujuan /Sasaran K/L	61
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bakebangpol Prov. Sulteng	74
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Bakebangpol Prov. Sulteng Tahun 2021-2026	70
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Bakebangpol Prov. Sulteng Tahun 2021-2026	76
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Bakebangpol Prov. Sulteng Periode 2021-2026	81
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Bakebangpol Prov. Sulteng Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Prov. Sulteng	93
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Procinsi Sulawesi Tenga	10
Gambar 4.1 Cascading Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	66

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Renstra (RENSTRA) merupakan dokumen perencanaan taktis Strategis yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam penyusunan Renja dan Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran berpedoman pada Rencana Strategis yang disusun untuk kurun waktu pelaksanaan 5 (lima) tahun. Perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengacu pada Rencana Strategis yang akan dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Memperhatikan ringkasan Renstra 2021-2024 Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, khususnya pada bagian sasaran strategis, tampak adanya keselarasan dengan Program Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 2021-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, tentang Penanganan Konflik Sosial;
10. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 232, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5475);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

- (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6485);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Konflik Sosial;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor

- 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Renja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
 27. Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Renja

- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 34. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050.12/7764/SJ dan 050.12/7765/SJ tanggal 10 Oktober Tahun 2017 tentang Penyusunan Program Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;
 35. Surat Edaran Mendagri Nomor 093/6397/SJ Tanggal 25 November tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);

37. Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
38. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 126);
39. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2013 tentang uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 adalah:

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kinerja (Renja) Tahunan;
2. Menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi;
3. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dalam mewujudkan optimalisasi kinerja;
4. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra adalah untuk :

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam

- pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah;
- b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
 - c. Memberikan pedoman bagi seluruh unit kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat uraian singkat latar belakang tentang perlunya Renstra (Renstra); Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra; dan Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah

Bab ini menjelaskan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi; Sumber Daya Perangkat Daerah; Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah

Bab ini menjelaskan tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah

dalam periode Tahun 2021-2026. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah yang disertai dengan Indikator kinerja targetnya selama 5 (lima) Tahun kedepan.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah dalam Lima Tahun mendatang.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini menjelaskan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk Periode 2021-2026.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menjelaskan Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 Struktur, Tugas dan Fungsi dan Perangkat Daerah

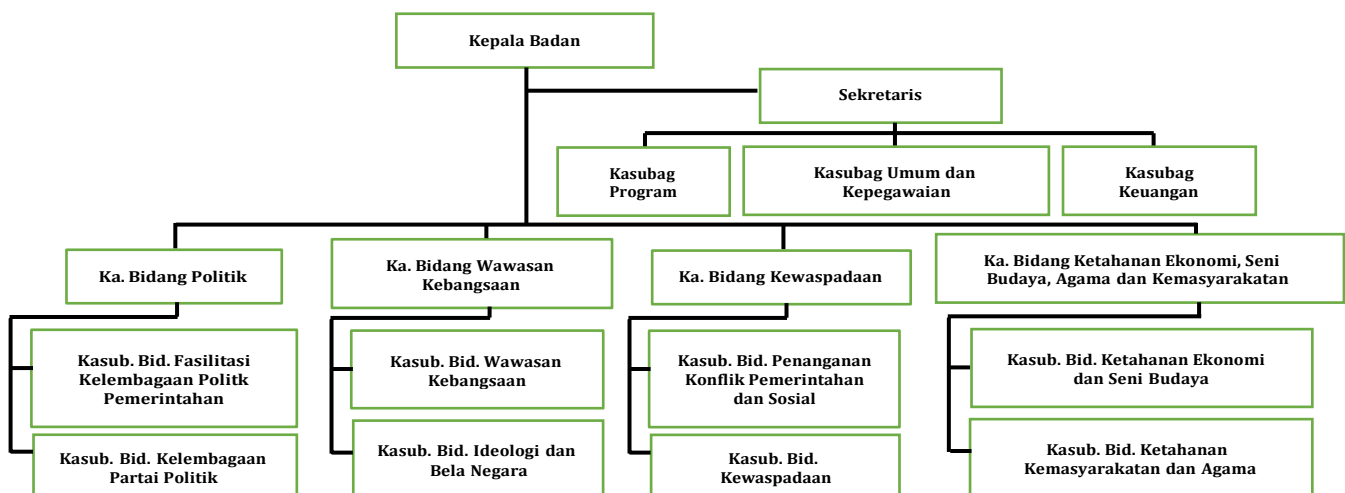
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah merupakan salah satu Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2013 tentang uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

2.1.1 Eselonisasi Jabatan Struktural

Eselonisasi jabatan structural pada Badan, meliputi :

- Kepala Badan merupakan jabatan structural eselon II.a;
- Sekretaris merupakan jabatan structural eselon III.a;
- Kepala Bidang merupakan jabatan structural eselon III.a;
- Kepala Sub Bagian merupakan jabatan structural eselon IV.a;
- Kepala Sub Bidang merupakan jabatan structural eselon IV.a;

Secara lengkap akan terlihat sebagaimana struktur pada Gambar 2.1. :



Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

2.1.2 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi setiap unsur dalam Struktur Organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1) Kepala Badan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Pemberian bahan perizinan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Pelaksanaan tugas lain di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah yang diberikan oleh Gubernur.

2) Sekretaris

Sekretariat yang dipimpin Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi meliputi Perencanaan Program, Keuangan dan Asset serta Kepegawaian dan Umum di Lingkungan Badan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan program;
- b. Pengelolaan urusan keuangan dan asset;
- c. Pelaksanaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga ;
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Sekretariat terdiri dari 3 Sub Bagian yaitu :

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan laporan. Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan Program meliputi :
 - a) Mengelola administrasi Sub Bagian Perencanaan Program;
 - b) Menghimpun Peraturan PerUndang-Undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan rencana program dan laporan;
 - c) Mengumpulkan bahan dan data usulan rencana program dan bahan/data penyusunan laporan;
 - d) Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan rencana program dan penyusunan laporan;
 - e) Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis mengenai penyusunan rencana program dan laporan;
 - f) Melakukan penyusunan rencana program kerja dan laporan;
 - g) Menyiapkan usul penetapan rencana program kerja Tahunan;
 - h) Memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - i) Menyiapkan laporan seluruh proses perencanaan program;
 - j) Melaksanakan penyusunan Lakip Badan;
 - k) Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan laporan;
 - l) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana dan program; dan

- m) Menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Program.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan administrasi Keuangan dan Aset. Uraian Tugas Sub. Bagian Keuangan dan Aset meliputi;
- a) Mengelola administrasi Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - b) Menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
 - c) Menghimpun bahan dan mengumpulkan data usul rencana keuangan dan aset;
 - d) Menyiapkan bahan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset;
 - e) Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset;
 - f) Melakukan urusan perbendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
 - g) Mengelola tata usaha keuangan dan aset;
 - h) Penyiapan pembayaran gaji pegawai ;
 - i) Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset;
 - j) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset ; dan
 - k) Menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- (3) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan urusan kepegawaian,

surat menyurat dan rumah tangga. Uraian Tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Meliputi:

- a) Mengelola administrasi Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- b) Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga ;
- c) Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pembuatan kartu pegawai (KARPEG), Asuransi Kesehatan (ASKES), TASPEN, Kartu Suami/Istri (Karsu/Karsi) ;
- d) Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG);
- e) Menyiapkan bahan dan mengelola surat masuk dan keluar ;
- f) Mengelola arsip dan dokumentasi serta menata ruang rapat pertemuan;
- g) Menyelenggarakan urusan rumah tangga, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
- h) Mengatur penerimaan tamu dan menyiapkan pelaksanaan upacara, rapat, pertemuan;
- i) Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
- j) Menyelenggarakan urusan kehumasan ; dan
- k) Menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian Umum.

3) Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi

terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud, Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan ;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan ;
- c. Penyiapan bahan Pembinaan/Bimbingan teknis di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan ;
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan terdiri dari 2 Sub Bidang yaitu :

- (1) Sub. Bidang Ideologi dan Bela Negara Sub. Bidang Ideologi dan Bela Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pembinaan Ideologi dan Bela Negara. Uraian tugas Sub. Bidang Ideologi dan Bela Negara meliputi :
 - a) Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Ideologi dan Bela Negara;
 - b) Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pembinaan Ideologi Negara;
 - c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan Ideologi dan Bela Negara;
 - d) Menyiapkan Bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Ideologi dan Bela Negara dengan Unit kerja terkait;

- e) Mengumpulkan data, mengklasifikasikan dan melakukan analisa terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan Ideologi dan Bela Negara;
 - f) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan di bidang Pembinaan Ideologi dan Bela Negara;
 - g) Melakukan upaya dalam rangka peningkatan kualitas Pembinaan Ideologi dan Bela Negara; dan
 - h) Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub. Bidang Ideologi dan Bela Negara.
- (2) Sub. Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Pembinaan Wawasan Kebangsaan. Uraian tugas Sub. Bidang Wawasan kebangsaan, meliputi :
- a) Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Wawasan Kebangsaan;
 - b) Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Wawasan Kebangsaan, Pembauran Bangsa dan Ketahanan Bangsa;
 - c) Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan Wawasan Kebangsaan, Pembauran Bangsa dan Ketahanan Bangsa;
 - d) Menyiapkan Bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Pembauran Bangsa dan Ketahanan Bangsa dengan Unit kerja terkait;
 - e) Mengumpulkan data, mengklasifikasikan dan melakukan analisa terhadap pelaksanaan kegiatan

- pembinaan Wawasan, Pembauran Bangsa dan Ketahanan Bangsa;
- f) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan di Bidang Pembinaan Wawasan Kebangsaan, Pembauran Bangsa dan Ketahanan Bangsa;
 - g) Melakukan upaya dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan di Bidang Pembinaan Wawasan Kebangsaan, Pembauran Bangsa dan Ketahanan Bangsa; dan
 - h) Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub. Bidang Wawasan Kebangsaan.

4) **BIDANG POLITIK**

Bidang Politik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembinaan Politik. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Politik mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang politik;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang politik;
- c. Penyiapan bahan pembinaan/ bimbingan teknis di bidang politik;
- d. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang politik;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan,

Bidang Politik Terdiri dari terdiri dari 2 Sub Bidang yaitu :

- (1) Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan

kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan, uraian tugas Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan, meliputi :

- a) Mengelola administrasi dan menyusun Program Kerja Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan;
- b) Menghimpun Peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan, Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah dalam Provinsi;
- c) Menyiapkan Bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan;
- d) Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan dengan unit kerja terkait;
- e) Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di bidang Kelembagaan Politik Pemerintahan;
- f) Mengumpulkan data, mengkategorikan dan melakukan analisa terhadap pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan, Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;
- g) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap bidang Kelembagaan Politik Pemerintahan, Pemulhan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;

- h) Melakukan upaya dalam rangka peningkatan di Bidang Kelembagaan Politik Pemerintahan; dan
 - i) Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan.
- (2) Sub. Bidang Kelembagaan Partai Politik mempunyai Tugas menyiapkan Bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kelembagaan Partai Politik. Uraian Tugas Sub. Bidang Kelembagaan Partai Politik, meliputi :
- a. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja sub Bidang Kelembagaan Partai Politik;
 - b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang Kelembagaan Partai Politik, Budaya dan Pendidikan Politik;
 - c. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan di bidang Kelembagaan Partai Politik;
 - d. Menyiapkan Bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di Bidang Kelembagaan Partai Politik dengan Unit kerja terkait;
 - e. Memberikan pelayanan teknis administrasi terhadap semua unsur di lingkungan Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik;
 - f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap bidang Kelembagaan Partai Politik;
 - g. Melakukan upaya dalam rangka peningkatan kualitas Kelembagaan Partai Politik, Budaya dan Pendidikan Politik; dan

- h. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub Bidang Kelembagaan Partai Politik.

5) **BIDANG KEWASPADAAN**

Bidang kewaspadaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Bidang kewaspadaan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang kewaspadaan mempunyai Fungsi :

- a. Penyiapan Bahan perumusan kebijakan di bidang Kewaspadaan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Kewaspadaan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Kewaspadaan;
- d. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Kewaspadaan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Kewaspadaan terdiri dari terdiri dari 2 Sub Bidang yaitu :

- (1) Sub. Bidang Kewaspadaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Pembinaan Kewaspadaan. Uraian tugas Sub. Bidang Kewaspadaan meliputi :
 - a) Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub. Bidang Kewaspadaan ;
 - b) Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan kewaspadaan dini, kerjasama Intelkam dan pengawasan orang asing;

- c) Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan kewaspadaan dini, kerjasama intelkam dan pengawasan orang asing;
 - d) Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan kewaspadaan dini dengan unit kerja terkait;
 - e) Mengumpulkan data, mengklasifikasikan dan melakukan analisa terhadap pelaksanaan kegiatan Kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, dan pengawasan orang asing;
 - f) Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam dan pengawasan orang asing;
 - g) Melakukan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan di bidang Kewaspadaan dini;
 - h) Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Kewaspadaan
- (2) Sub. Bidang Penanganan Konflik Pemerintahan dan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di Bidang Penanganan Konflik Pemerintahan dan Sosial. uraian Tugas Sub. Bidang Penanganan Konflik Pemerintahan dan Sosial, meliputi :
- a. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Penanganan Konflik Pemerintahan dan Sosial;
 - b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Penanganan Konflik Pemerintahan dan Konflik Sosial;

- c. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Penanganan Konflik Pemerintahan dan Sosial;
- d. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Penanganan Konflik Pemerintahan dan Sosial dengan unit kerja terkait;
- e. Mengumpulkan data, mengklasifikasikan dan melakukan analisa terhadap pelaksanaan kegiatan Penanganan Konflik Pemerintahan dan Konflik Sosial;
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang Penanganan Konflik Pemerintahan dan Konflik Sosial;
- g. Melakukan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan di bidang Penanganan Konflik Pemerintahan dan Konflik Sosial; dan
- h. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penanganan Konflik Pemerintahan dan Sosial.

6) BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN

Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan Bahan perumusan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - c. Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - e. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan terdiri dari 2 Sub Bidang yaitu :**
- (1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya. Uraian tugas Sub. Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya meliputi :
 - a) Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama;
 - b) Menghimpun peraturan perUndang-Undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan laporan pelaksanaan tugas Sub. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama;
 - c) Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama;

- d) Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama;
 - e) Mengumpulkan data, mengklasifikasikan dan menganalisa terhadap pelaksanaan kegiatan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama;
 - f) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama;
 - g) Melakukan upaya dalam rangka peningkatan kualitas Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama;
 - h) Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama.
- (2) Sub. Bidang Ketahanan Kemasyarakatan dan Agama mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang Ketahanan Kemasyarakatan dan Agama. Uraian Tugas Sub. Bidang Ketahanan Kemasyarakatan dan Agama, meliputi :
- a) Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub. Bidang Ketahanan Kemasyarakatan dan Agama;
 - b) Menghimpun peraturan perUndang-Undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Ketahanan Kemasyarakatan dan Agama;
 - c) Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan Penanganan Sosial Kemasyarakatan;

- d) Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan dan Penanganan masalah Kemasyarakatan;
- e) Mengumpulkan data, mengklasifikasikan dan menganalisa terhadap pelaksanaan Ketahanan Kemasyarakatan dan Agama;
- f) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Kegiatan Ketahanan Kemasyarakatan, Agama Organisasi Kemasyarakatan Penanganan masalah Sosial Kemasyarakatan;
- g) Melakukan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan di bidang Ketahanan Kemasyarakatan dan Agama; dan
- h) Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub. Bidang Ketahanan Kemasyarakatan dan Agama.

Dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah telah mengembangkan Kemitraan dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Organisasi Perempuan dan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman kerja sama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

a. Jumlah dan status kepegawaian

Jumlah Pegawai dan status Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah sampai Bulan Desember 2021 sebanyak 107 orang, Jumlah tersebut terdiri dari 52 orang Pegawai Negeri Sipil, 55 orang Tenaga

- kontrak. Dari 107 orang pegawai tersebut, sebanyak 69 orang laki-laki dan 38 orang perempuan.
- b. Status Pendidikan dan Golongan Kepegawaian Berdasarkan tingkat pendidikan, dari 53 orang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah, sebanyak 1 orang Pegawai berpendidikan strata 3 (Doktor), 12 orang berpendidikan strata 2 (pasca sarjana), 24 orang berpendidikan strata 1 (sarjana), 2 orang berpendidikan Diploma III, 12 orang berpendidikan SLTA, 2 orang berpendidikan SLTP, dan tidak ada Pegawai berpendidikan SD.

Tabel 2.1
Daftar Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Pendidikan
(Data Bulan Desember 2021) :

Jenjang Pendidikan	Jumlah
Strata 3	1
Strata 2	12
Strata 1	24
Diploma 3	2
SLTA	11
SLTP	2
SD	-
Total	52

- c. Golongan Kepegawaian
- Sedangkan berdasarkan Gol. Kepegawaian, dari 53 orang Pegawai Negeri Sipil terdiri dari Gol ; I 2 orang ; Gol. II 12 orang; Gol. III 25 orang ; Gol. IV 13 orang.

Tabel 2.2
Daftar Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Menurut ke pangkatan
(Data Bulan Desember 2021) :

Pangkat/golongan	Jumlah
Golongan I	2
Golongan II	12
Golongan III	25
Golongan IV	13
Total	52

2.2.2 Asset/Modal OPD

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan guna menjalankan tugas pokok dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana sebagai asset/modal, yang terdiri dari :

Tabel 2.3
DAFTAR SARANA DAN PRASARANA
(Data Bulan Desember 2021) :

No	Jenis Barang	Jumlah
1	2	3
1	Bangunan Gedung	1 Gedung
	Alat-alat Angkutan	31 Unit
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	6 Unit
2	Pick Up	1 unit
3	Sepeda Motor	24 unit
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	419 Buah
1	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	1 buah
2	Lemari Besi	10 buah
3	Filling Besi/Metal	2 buah
4	Brand Kas	3 buah
5	Lemari kayu	3 buah
6	Mesin Absensi	1 buah

No	Jenis Barang	Jumlah
1	2	3
7	Alat Kantor Lainnya	1 buah
8	Kursi Besi/Metal	21 buah
9	Meja Rapat	17 buah
10	Kursi Rapat	25 buah
11	Kursi Tamu	4 buah
12	Meja Komputer	2 buah
13	Tenda	2 buah
14	Meja Biro	38 buah
15	Sofa	1 buah
16	Kursi Kerja	28 buah
17	Gordyn	60 buah
18	Karpet	2 buah
19	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	1 buah
20	Lemari Es	1 buah
21	AC Split	20 buah
22	Dispenser	13 buah
23	Televisi	6 buah
24	Loudspeaker	2 Buah
25	Sound System	1 Buah
26	Dispenser	1 Buah
27	Handy Cam	1 Buah
28	Tripot Speaker	2 buah
29	P.C Unit/ Komputer PC	22 buah
30	Laptop	10 buah
31	Note Book	17 buah
32	Printer	13 buah
33	Scanner	6 buah
34	Harddisk Internal	1 buah
35	Harddisk Eksternal	1 Buah
36	Speaker Aktive Komputer	2 Buah
37	Power Supply	2 Buah
38	Wireless Lan (USB)	1 Buah
39	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah
40	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6 Buah
41	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	7 Buah
42	Meja Operator	3 Buah
43	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah

No	Jenis Barang	Jumlah
1	2	3
44	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1 Buah
45	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11 Buah
46	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	10 Buah
47	Kursi Rapat Pejabat Eselon II	1 Buah
48	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Lain-lain	1 Buah
49	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	3 Buah
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	46 Buah
1	Proyektor + Attachment	1 Buah
2	Equalizer	1 Buah
3	Microphone/Wireless Mic	1 Buah
4	Microphone Table stand	2 Buah
5	Camera Electronic	3 Buah
6	Camera Film	1 Buah
7	Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain	1 Buah
8	Facsimile	2 Buah
9	Alat Komunikasi Radio VHF Lain-lain	9 Buah
10	Alat Pemancar VHF/FM Lain- Lain	1 Buah
11	Antena VHF/FM Portable	2 Buah
12	Peralatan Antena VHF/FM Lain-lain	22 Buah
	Alat Laboratorium	4 Buah
1	Exhaust Fan	3 Buah
2	Kabel Listrik	1 Buah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah memberikan sejumlah layanan, baik layanan yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Berikut beberapa layanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah.

a. Pelayanan Internal

- 1) Penyusunan Program;
- 2) Pelaksanaan Inventarisasi, Pengolahan, Penyajian, dan Pemeliharaan Data Badan;
- 3) Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Program Badan;
- 4) Penyusunan Laporan Badan;
- 5) Penyusunan Perbendaharaan Keuangan Badan;
- 6) Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Badan;
- 7) Pelaksanaan Verifikasi Anggaran Badan;
- 8) Penyusunan PertanggungSulawesian Anggaran Badan;
- 9) Pengelolaan Kearsipan;
- 10) Penyelenggaraan Kerumahtanggaan Badan;
- 11) Pengelolaan Data Kepegawaian Badan;
- 12) Penyiapan Bahan Pembinaan Pegawai Badan;

b. Pelayanan Eksternal

- 1) Pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada ormas;
- 2) Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
- 3) Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM);
- 4) Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- 5) Fasilitasi Layanan Organisasi Kemasyarakatan;
- 6) Fasilitasi upaya Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan, Kewaspadaan Nasional, Pengembangan upaya Penanganan Konflik, Pembauran Bangsa, serta Bela Negara;
- 7) Fasilitasi Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;

Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah diukur dari tercapainya indikator kinerja sasaran, ini dilakukan untuk melihat tingkat kinerja Badan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Apabila target dari indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis dapat dicapai, maka kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah dapat



dikategorikan baik. Pencapaian indikator kinerja periode 2016-2021 secara ringkas ditunjukkan pada Tabel 2.4

**Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Tahun 2016-2021
Provinsi Sulawesi Tengah**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Menurunnya Jumlah Konflik/Kasus yang terjadi di Masyarakat				Konflik	5	4	3	2	1	1	11	2	2	2	2	-	2.2	0.5	0.67	1.00	2.00	-
2	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sulawesi Tengah				Indeks	69,79	75,29	79,30	82,00	85,00	-	72,20	69,79	75,29	77,27	75,85	-	1.03	0.93	0.95	0.94	0.89	-
3	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan cinta tanah air serta partisipasi masyarakat dalam pendidikan pendahuluan Bela Negara				Orang	900	900	1.000	1.000	1.000	-	1.835	1.500	1.545	1.000	75	-	2.04	1.67	1.55	1.00	0.08	-
4	Meningkatnya pemahaman Masyarakat Mengenai Pemberantasan Penyakit Masyarakat				Orang	200	250	275	325	350	-	400	350	250	275	50	-	2.00	1.40	0.91	0.85	0.14	-
5	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan				Orang	335	335	335	330	330	-	588	690	345	345	150	-	1.76	2.06	1.03	1.05	0.45	-
6	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (%)				Persentase	55	20	40	60	80	80	55	20	40	60	80	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-
7	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur				Persentase	60	20	40	60	80	80	60	20	40	60	80	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-
8	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur				Persentase	60	20	40	60	80	80	60	20		30	0	-	1.00	1.00	0.00	0.50	0.00	-
9	Persentase Sumberdaya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai Bidanganya				Persentase	60	20	40	60	80	80	60	20	40	60	80	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-
10	Tingkat ketetapan waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-
11	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang dihasilkan				Dokumen	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	1.50	1.00	1.00	1.00	1.00	-
12	Meningkatnya Pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan di semua elemen Masyarakat				Persentase	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	28.57	-	1.00	1.00	1.00	1.00	0.29	-
13	Meningkatnya Kemitraan Wawasan Kebangsaan diantara Anggota FKUB, FKDM, FPK, dan Organisasi Kemasyarakatan/LSM, Tokoh Adat, Agama, Perempuan dan Pemuda				Persentase	100	100	100	100	100	500	100	100	100	100	0	-	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00



14	Menurunnya Jumlah Konflik/Kasus yang terjadi di Masyarakat Prov. Sulteng				Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	75	-	1.00	1.00	1.00	1.00	0.75	0.00
15	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sulawesi Tengah				Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	60	-	1.00	1.00	1.00	1.00	0.60	0.00
16	Meningkatnya pemahaman Masyarakat Mengenai Pemberantasan Penyakit Masyarakat				Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50	-	1.00	1.00	1.00	1.00	0.50	0.00
17	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Seni Budaya Agama dan Kemasyarakatan.				Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50	-	1.00	1.00	1.00	1.00	0.50	0.00

Dalam upaya penyelenggaraan pelayanan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah. Anggaran tersebut diperoleh setiap Tahun sesuai dengan Program/kegiatan yang telah ditetapkan per-Tahunnya. Selain dari pencapaian indikator kinerja sasaran, realisasi anggaran pun menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan.

Dalam Tabel 2.5 disajikan jumlah anggaran serta besarnya realisasi pendanaan yang telah dikeluarkan dalam periode 2016-2021.

**Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Periode 2016 - 2021**

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Pagu Anggaran Belanja Langsung	8,493,290	5,800,396	6,056,279	6,169,324	2,757,277	0	7,875,637	5,292,791	5,927,496	5,684,614	2,728,583	0	0.93	0.91	0.98	0.92	0.99	0	-67.54	-67.87
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,142,777	1,193,315	1,089,084	1,270,051	1,101,513	0	1,099,212	1,135,293	1,056,695	1,262,348	1,080,652	0	0.96	0.95	0.97	0.99	0.98	0	-3.61	-5.44
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	1,142,777	1,193,315	1,089,084	1,270,051	1,101,513	0	1,099,212	1,135,293	1,056,695	1,262,348	1,080,652	0	0.96	0.95	0.97	0.99	0.98	0	-3.61	-5.44
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Pemerintah	419,387	472,500	950,321	1,482,844	347,325	0	394,010	382,859	905,658	1,461,133	342,470	0	0.94	0.81	0.95	0.99	0.99	0	-17.18	-18.34
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100,840	75,000	441,291	980,000	0	0	98,640	73,451	404,032	965,430	0	0	0.98	0.98	0.92	0.99	-!	0	-	-100.00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0	65,000	95,147	125,000	0	0	0	64,500	95,000	124,999	0	0	-!	0.99	1.00	1.00	-!	0	-!	-!
	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	210,840	200,000	388,568	347,844	314,407	0	187,678	117,711	381,559	340,703	309,553	0	0.89	0.59	0.98	0.98	0.98	0	49.12	46.82
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	107,707	132,500	25,316	30,000	32,917	0	107,691	127,197	25,068	30,000	32,917	0	1.00	0.96	0.99	1.00	1.00	0	-69.44	-69.44
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	45,900	215,551	0	44,250	0	0	45,900	173,530	0	44,250	0	0	1.00	0.81	-!	1.00	-!	0	-	-100.00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	45,900	64,751	0	44,250	0	0	45,900	53,644	0	44,250	0	0	1.00	0.83	-!	1.00	-!	0	-	-100.00
	Pengadaan Pakaian Olahraga beserta Kelengkapannya dan Pengadaan Pakaian Batik Khas Daerah	0	150,800	0	0	0	0	0	119,886	0	0	0	0	-!	0.80	-!	-!	-!	0	-!	-!
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	68,090	39,750	56,900	29,400	4,500	0	57,214	29,799	55,443	20,000	4,500	0	0.84	0.75	0.97	0.68	1.00	0	-93.39	-93.39



NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	68,090	39,750	56,900	29,400	4,500	0	57,214	29,799	55,443	20,000	4,500	0	0.84	0.75	0.97	0.68	1.00	0	-93.39	-93.39
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	320,00	168,54	148,04	140,12	71,939	0	306,02	147,98	146,15	140,00	71,939	0	0.96	0.88	0.99	1.00	1.00	0	-77.52	-77.52
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	62,650	26,650	30,000	14,820	0	0	54,732	26,650	30,000	14,820	0	-!	0.87	1.00	1.00	1.00	0	-!	-!
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	0	3,288	3,288	5,000	1,819	0	0	3,215	3,288	5,000	1,819	0	-!	0.98	1.00	1.00	1.00	0	-!	-!
	Penyusunan Laporan Keuangan	117,190	0	0	0	0	0	117,190	0	0	0	0	0	1.00	-!	-!	-!	-!	0	-	-100.00
	Peningkatan Kualitas Perencanaan Sistem Keuangan Internal	202,812	102,607	118,107	105,121	55,300	0	188,835	90,036	116,216	105,000	55,300	0	0.93	0.88	0.98	1.00	1.00	0	-72.73	-72.73
	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan	1,130,570	1,325,853	727,612	582,759	210,729	0	1,059,236	1,121,745	710,475	345,000	210,607	0	0.94	0.85	0.98	0.59	1.00	0	-81.36	-81.37
	Rapat Koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan	0	367,986	0	388,927	50,734	0	0	288,559	318,122	150,000	50,734	0	-!	0.78	-!	0.39	1.00	0	-!	-!
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan/Peningkatan Kualitas Perencanaan	772,810	957,867	406,001	193,832	159,995	0	723,851	833,186	392,352	195,000	159,873	0	0.94	0.87	0.97	1.01	1.00	0	-79.30	-79.31
	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan	357,759	0	321,611	0	0	0	335,385	0	0	0	0	0	0.94	-!	0.00	-!	-!	0	-	-100.00
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	828,764	464,168	542,075	369,637	135,645	0	803,467	461,148	536,894	369,637	135,345	0	0.97	0.99	0.99	1.00	1.00	0	-83.63	-83.67
	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan Masyarakat	95,547	0	0	0	0	0	92,793	0	0	0	0	0	0.97	-!	-!	-!	-!	0	-	-100.00
	Forum Pembauran Bangsa	177,000	69,500	119,019	71,380	21,538	0	164,509	69,500	118,019	71,380	21,538	0	0.93	1.00	0.99	1.00	1.00	0	-87.83	-87.83
	Dialog Kebangsaan Tokoh Masyarakat, Agama, Adat, Perempuan dan Pemuda	116,276	46,635	40,413	33,422	0	0	114,996	45,885	40,413	33,422	0	0	0.99	0.98	1.00	1.00	-!	0	-	-100.00



NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Pembinaan Kesadaran Bela Negara	141,217	118,072	163,310	102,596	95,884	0	140,327	117,502	161,095	102,596	95,584	0	0.99	1.00	0.99	1.00	1.00	0	-32.10	-32.31
	Forkom Peningkatan Generasi Muda dan Pramuka	97,500	58,795	52,413	64,097	18,223	0	94,751	58,195	52,313	64,097	18,223	0	0.97	0.99	1.00	1.00	1.00	0	-81.31	-81.31
	Pelatihan Peningkatan Wawasan Pemuda	84,425	60,411	54,749	32,261	0	0	79,294	60,111	54,659	32,261	0	0	0.94	1.00	1.00	1.00	-!	0	-	-100.00
	Pelestarian dan Pengembangan Bhs. Negara dan Bhs. Daerah	116,798	59,553	64,421	32,194	0	0	116,798	59,303	62,695	32,194	0	0	1.00	1.00	0.97	1.00	-!	0	-	-100.00
	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial dikalangan Masyarakat	0	51,202	47,750	33,688	0	0	0	50,652	47,700	33,688	0	0	-!	0.99	1.00	1.00	-!	0	-!	-!
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	653,098	218,081	231,484	237,279	78,811	0	635,834	215,333	231,262	208,104	77,916	0	0.97	0.99	1.00	0.88	0.99	0	-87.93	-88.07
	Sosialisasi/Seminar Peningkatan Wawasan Kebangsaan	215,626	54,717	59,025	67,813	68,819	0	214,752	53,569	58,903	67,813	67,924	0	1.00	0.98	1.00	1.00	0.99	0	-68.08	-68.50
	Orientasi Ketahanan Bangsa	188,741	41,892	53,661	102,015	0	0	187,403	41,142	53,661	72,840	0	0	0.99	0.98	1.00	0.71	-!	0	-	-100.00
	Dialog Kemitraan FKUB, FKDM, FPK dan Orkesmas Kabupaten/Kota	248,731	60,700	63,688	33,681	0	0	233,679	60,150	63,588	33,681	0	0	0.94	0.99	1.00	1.00	-!	0	-	-100.00
	Pendidikan Wawasan Kebangsaan	0	60,772	55,110	33,769	9,991	0	0	60,472	55,110	33,769	9,991	0	-!	1.00	1.00	1.00	1.00	0	-!	-!
	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	1,093,678	511,123	913,228	737,235	210,158	0	1,060,207	502,739	905,387	695,317	209,633	0	0.97	0.98	0.99	0.94	1.00	0	-80.78	-80.83
	Pengamatan, Pengawasan dan Pengamanan (Matwas)	120,419	17,909	191,939	149,423	63,810	0	119,511	17,903	191,083	149,423	63,285	0	0.99	1.00	1.00	1.00	0.99	0	-47.01	-47.45
	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	245,773	82,850	138,853	95,702	13,389	0	230,505	79,100	138,853	70,703	13,389	0	0.94	0.95	1.00	0.74	1.00	0	-94.55	-94.55
	Koordinasi Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing	185,382	71,236	11,808	50,000	6,520	0	178,918	69,696	11,808	30,000	6,520	0	0.97	0.98	1.00	0.60	1.00	0	-96.48	-96.48



NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Koordinasi Penanganan Konflik	126,780	8,725	41,922	50,000	10,328	0	126,230	8,725	41,393	50,000	10,328	0	1.00	1.00	0.99	1.00	1.00	0	-91.85	-91.85
	Forum Komunikasi Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penanganan Konflik di Daerah	305,216	113,394	101,532	79,155	54,827	0	298,269	110,855	99,655	79,155	54,827	0	0.98	0.98	0.98	1.00	1.00	0	-82.04	-82.04
	Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan Antar Negara	110,107	89,301	92,707	75,462	0	0	106,774	89,301	89,951	78,543	0	0	0.97	1.00	0.97	1.04	-!	0	-	-100.00
	Forum Komunikasi dan Koordinasi Pencegahan Faham Radikal	0	95,038	86,934	84,439	0	0	0	94,738	85,486	84,439	0	0	-!	1.00	0.98	1.00	-!	0	-!	-!
	Rapat Koordinasi Sinergitas Hubungan Antar Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota dalam rangka Peningkatan Kewaspadaan	0	32,670	247,533	153,054	61,285	0	0	32,420	247,158	153,054	61,285	0	-!	0.99	1.00	1.00	1.00	0	-!	-!
	Program Pendidikan Politik Masyarakat	1,294,503	636,224	798,660	775,730	388,296	0	1,257,213	605,656	792,429	752,330	387,336	0	0.97	0.95	0.99	0.97	1.00	0	-70.00	-70.08
	Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	242,464	0	0	0	0	0	228,951	0	0	0	0	0	0.94	-!	-!	-!	-!	0	-	-100.00
	Pemantapan Etika Budaya Politik	225,000	93,005	66,842	110,849	3,580	0	216,301	90,505	66,492	110,849	3,570	0	0.96	0.97	0.99	1.00	1.00	0	-98.41	-98.41
	Analisa Perkembangan Politik dan Pemetaan Data Base Parpol di Daerah	232,217	18,835	294,459	316,442	315,081	0	217,919	18,160	290,778	318,222	314,531	0	0.94	0.96	0.99	1.01	1.00	0	35.68	35.45
	Forum Komunikasi Politik (KOMPOL)	319,821	95,345	118,787	124,179	4,732	0	319,161	92,593	116,937	127,499	4,332	0	1.00	0.97	0.98	1.03	0.92	0	-98.52	-98.65
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	275,000	141,248	78,795	144,074	55,903	0	274,880	136,608	78,795	115,574	55,903	0	1.00	0.97	1.00	0.80	1.00	0	-79.67	-79.67
	Fasilitasi Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia	0	29,700	239,777	80,184	9,000	0	0	29,200	239,427	80,184	9,000	0	-!	0.98	1.00	1.00	1.00	0	-!	-!



NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 bagi Masy. Sulawesi Tengah	0	258,091	0	0	0	0	0	238,589	0	0	0	0	-!	0.92	-!	-!	-!	0	-!	-!
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	565,830	141,702	169,402	154,378	58,411	0	302,260	136,816	167,897	128,650	58,235	0	0.53	0.97	0.99	0.83	1.00	0	-89.68	-89.71
	Pencegahan Peredaran Uang Palsu	142,284	83,431	75,381	70,000	23,425	0	139,785	81,858	74,131	70,000	23,425	0	0.98	0.98	0.98	1.00	1.00	0	-83.54	-83.54
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pekat)	176,771	0	0	0	0	0	162,475	0	0	0	0	0	0.92	-!	-!	-!	-!	0	100.00	-100.00
	Sosialisasi Pencegahan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	246,775	58,271	94,021	84,378	34,986	0	0	54,958	93,766	58,650	34,810	0	0.00	0.94	1.00	0.70	0.99	0	-85.82	-85.89
	Program Pemberdayaan Ketahanan Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	930,692	413,583	429,468	345,640	149,950	0	855,058	379,890	419,203	257,845	149,950	0	0.92	0.92	0.98	0.75	1.00	0	-83.89	-83.89
	Peningkatan Kesadmas akan Nilai Luhur Budaya Bangsa	104,750	75,575	71,379	47,838	49,709	0	98,901	72,225	70,079	47,838	49,709	0	0.94	0.96	0.98	1.00	1.00	0	-52.55	-52.55
	Forkom Peningkatan Peran Ormas/LSM	151,479	86,250	76,350	50,800	23,176	0	145,876	81,525	75,765	50,800	23,176	0	0.96	0.95	0.99	1.00	1.00	0	-84.70	-84.70
	Forum Kerukunan Umat Beragama	275,463	87,598	131,229	138,323	19,550	0	257,540	74,140	124,099	50,158	19,550	0	0.93	0.85	0.95	0.36	1.00	0	-92.90	-92.90
	Pemantauan dan Evaluasi Ormas LSM/Pengembangan Seni Budaya	100,000	20,000	20,000	10,000	25,115	0	91,168	18,250	20,000	10,000	25,115	0	0.91	0.91	1.00	1.00	1.00	0	-74.89	-74.89
	Bintek Aplikasi Database Ormas/LSM	130,238	59,150	52,450	48,405	21,150	0	112,466	56,750	51,200	48,650	21,150	0	0.86	0.96	0.98	1.01	1.00	0	-83.76	-83.76
	Forkom Peran Masyarakat Terhadap Perkembangan Kebudayaan/Kesenian di Daerah	168,762	85,010	78,060	50,275	11,250	0	149,109	77,000	78,060	50,400	11,250	0	0.88	0.91	1.00	1.00	1.00	0	-93.33	-93.33



NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI *	-	-	-	-	-	8,936,182.13	-	-	-	-	-	7,964,155.24	-	-	-	-	-	0.89		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	140,571.00	-	-	-	-	-	134,764.00	-	-	-	-	-	0.96		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	2,220	-	-	-	-	-	2,220	-	-	-	-	-	1.00		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-	-	2,220	-	-	-	-	-	2,125	-	-	-	-	-	0.96		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	-	-	2,220	-	-	-	-	-	570	-	-	-	-	-	0.26		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	-	-	570	-	-	-	-	-	570	-	-	-	-	-	1.00		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	-	-	570	-	-	-	-	-	475	-	-	-	-	-	0.83		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	-	15,480	-	-	-	-	-	15,480	-	-	-	-	-	1.00		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	117,291	-	-	-	-	-	113,324	-	-	-	-	-	0.97		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	7,526,995.05	-	-	-	-	-	6,568,238.68	-	-	-	-	-	0.87		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	-	6,322,218	-	-	-	-	-	5,370	-	-	-	-	-	0.85		



NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	-	-	1,183,190	-	-	-	-	-	1,175,332	-	-	-	-	-	-	0.99	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	-	-	5,817	-	-	-	-	-	5,817	-	-	-	-	-	-	1.00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-	-	-	760	-	-	-	-	-	760	-	-	-	-	-	-	1.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	1.00	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-	-	-	-	2,220	-	-	-	-	-	2,220	-	-	-	-	-	-	1.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	-	-	1,140	-	-	-	-	-	1,140	-	-	-	-	-	-	1.00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	-	-	1,650	-	-	-	-	-	1,650	-	-	-	-	-	-	1.00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	40,553.00	-	-	-	-	-	40,450.00	-	-	-	-	-	-	1.00	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-	2,125	-	-	-	-	-	2,125	-	-	-	-	-	-	1.00	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	-	-	475	-	-	-	-	-	475	-	-	-	-	-	-	1.00	



NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	-	12,003	-	-	-	-	-	11,900	-	-	-	-	-	0.99		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	-	25,950	-	-	-	-	-	25,950	-	-	-	-	-	1.00		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	32,869.75	-	-	-	-	-	32,869.75	-	-	-	-	-	1.00		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-!		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	32,870	-	-	-	-	-	32,870	-	-	-	-	-	1.00		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	314,987.85	-	-	-	-	-	310,363.65	-	-	-	-	-	0.99		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	-	-	8,182	-	-	-	-	-	8,182	-	-	-	-	-	1.00		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	118,200	-	-	-	-	-	115,254	-	-	-	-	-	0.98		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	-	-	60,048	-	-	-	-	-	60,048	-	-	-	-	-	1.00		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	15,120	-	-	-	-	-	15,120	-	-	-	-	-	1.00		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	-	-	11,625	-	-	-	-	-	11,625	-	-	-	-	-	1.00		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	-	101,813	-	-	-	-	-	100,135	-	-	-	-	-	0.98		



NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	169,242.88	-	-	-	-	-	168,685.00	-	-	-	-	-	-	1.00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-!	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-	169,243	-	-	-	-	-	168,685	-	-	-	-	-	-	1.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	242,592.53	-	-	-	-	-	241,518.73	-	-	-	-	-	-	1.00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	-	-	12,481	-	-	-	-	-	12,481	-	-	-	-	-	-	1.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	-	-	77,062	-	-	-	-	-	76,035	-	-	-	-	-	-	0.99	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	19,800	-	-	-	-	-	19,786	-	-	-	-	-	-	1.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	-	-	133,250	-	-	-	-	-	133,217	-	-	-	-	-	-	1.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	468,370.09	-	-	-	-	-	467,265.43	-	-	-	-	-	-	1.00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	-	204,300	-	-	-	-	-	203,980	-	-	-	-	-	-	1.00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	-	-	-	-	-	144,460	-	-	-	-	-	144,241	-	-	-	-	-	-	1.00	



NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Dinas Operasional atau Lapangan																				
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-	26,040	-	-	-	-	-	25,875	-	-	-	-	-	0.99		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	93,570	-	-	-	-	-	93,170	-	-	-	-	-	1.00		
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN *	-	-	-	-	-	408,757.80	-	-	-	-	-	401,877.80	-	-	-	-	-	0.98		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	-	-	-	408,757.80	-	-	-	-	-	401,877.80	-	-	-	-	-	0.98		
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	-	-	-	-	-	4,538	-	-	-	-	-	4,538	-	-	-	-	-	1.00		
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-!		
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,	-	-	-	-	-	154,647	-	-	-	-	-	153,897	-	-	-	-	-	1.00		

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan																				
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	-	-	-	-	-	88,171	-	-	-	-	-	86,821	-	-	-	-	-	-	0.98	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	-	-	-	-	-	161,402	-	-	-	-	-	156,622	-	-	-	-	-	-	0.97	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK *	-	-	-	-	-	2,184,651.18	-	-	-	-	-	2,161,848.58	-	-	-	-	-	-	0.99	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	-	-	-	-	-	2,184,651.18	-	-	-	-	-	2,161,848.58	-	-	-	-	-	-	0.99	



NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik																				
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	-	-	-	-	3,760	-	-	-	-	-	3,760	-	-	-	-	-	-	1.00	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	-	-	-	-	6,260	-	-	-	-	-	6,260	-	-	-	-	-	-	1.00	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	-	-	-	-	-	1,800,961	-	-	-	-	-	1,800,961	-	-	-	-	-	-	1.00	



NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																				
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	-	-	-	-	99,672	-	-	-	-	-	98,172	-	-	-	-	-	-	0.98	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-	-	-	-	-	273,999	-	-	-	-	-	253,146	-	-	-	-	-	-	0.92	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN *	-	-	-	-	-	5,823,320.78	-	-	-	-	-	5,802,793.38	-	-	-	-	-	-	1.00	



NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-	-	-	-	-	5,823,320.78	-	-	-	-	-	5,802,793.38	-	-	-	-	-	-	1.00	
	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	-	-	-	-	4,129	-	-	-	-	-	4,129	-	-	-	-	-	-	1.00	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	-	-	-	-	3,816	-	-	-	-	-	3,816	-	-	-	-	-	-	1.00	
	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	-	-	-	-	5,456,242	-	-	-	-	-	5,455,642	-	-	-	-	-	-	1.00	
	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-!	



NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																				
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-	-	-	-	-	359,134	-	-	-	-	-	339,207	-	-	-	-	-	-	0.94	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA *	-	-	-	-	-	208,630.85	-	-	-	-	-	205,903.95	-	-	-	-	-	-	0.99	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-	-	-	-	208,630.85	-	-	-	-	-	205,903.95	-	-	-	-	-	-	0.99	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	-	-	-	-	3,843	-	-	-	-	-	3,843	-	-	-	-	-	-	1.00	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,	-	-	-	-	-	3,843	-	-	-	-	-	3,843	-	-	-	-	-	-	1.00	



NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																				
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	-	-	-	-	56,435	-	-	-	-	-	55,985	-	-	-	-	-	-	0.99	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	-	-	-	-	66,325	-	-	-	-	-	65,525	-	-	-	-	-	-	0.99	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	-	-	-	-	-	78,185	-	-	-	-	-	76,708	-	-	-	-	-	-	0.98	



NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL *	-	-	-	-	-	649,913.75	-	-	-	-	-	617,810.45	-	-	-	-	-	0.95		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-	-	-	-	-	649,913.75	-	-	-	-	-	617,810.45	-	-	-	-	-	0.95		
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	-	-	-	-	2,894	-	-	-	-	-	2,894	-	-	-	-	-	1.00		
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	-	-	-	-	-	43,990	-	-	-	-	-	43,765	-	-	-	-	-	0.99		



NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN						RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Penanganan Konflik di Daerah																				
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	-	-	-	-	40,400	-	-	-	-	-	40,400	-	-	-	-	-	-	1.00	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	-	-	-	-	-	260,516	-	-	-	-	-	252,810	-	-	-	-	-	-	0.97	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan	-	-	-	-	-	196,192	-	-	-	-	-	186,169	-	-	-	-	-	-	0.95	

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN						REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN						RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																				
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	105,922	-	-	-	-	-	91,772	-	-	-	-	-	0.87		

* Program menyesuaikan Perubahan Nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah

Sesuai dengan perkembangan Pembangunan Nasional yang mengarahkan kepada kebijakan Pembangunan untuk Pencapaian Prioritas Nasional maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan dan melaksanakan tugas pembantuan yang dilimpahkan atau diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta terjaminnya sistim Politik yang Demokratis.

Untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran perlu adanya identifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), adapun faktor dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Faktor Internal

1) Kekuatan (*Strenght*)

- a) Tersedianya Sistem Informasi (Website)
- b) Terjalannya Kemitraan dengan Lembaga - Lembaga Ormas, Orpol dan Forum-forum (FPK, FKDM, FKUB)
- c) Adanya sumber daya manusia dan komitmen dari aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal.
- d) Adanya sarana dan prasarana

2) Kelemahan (*Weakness*)

- a) Sumber daya manusia yang ada belum sebanding dengan beban tugas.
- b) Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- c) Terbatasnya dana yang tersedia di dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.
- d) Data yang ada kurang lengkap

b. Faktor Eksternal

1) Peluang (*Opportunity*)

- a) Kultur masyarakat yang majemuk
- b) Jumlah Penduduk wajib pilih, Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan (DPT). Syarat Pemilih :
 - Genap berusia 17 tahun/lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin.
 - Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter.
 - Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan KTP Elektronik
 - Tidak sedang menjadi anggota TNI/POLRI
- c) Perkembangan Teknologi dan Informasi
- d) Tersediannya regulasi Pelayanan pemberian rekomendasi dan atau perijinan penelitian, tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2018 Bab III Pasal 6.
- e) Tersedianya berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah dalam membangun kemitraan strategis dengan Aparat Keamanan, Instansi terkait, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan.
- f) Kerjasama yang baik dengan Instansi Vertikal

2) Ancaman (*Threath*)

- a) Penurunan Nilai-Nilai Nasionalisme yang ada di Masyarakat
- b) Penurunan Pemahaman terhadap Ideologi Pancasila
- c) Adanya potensi radikalisme dan kerawanan gangguan pelaku terorisme



- d) Munculnya LSM dan Ormas baru
- e) Masih Rendahnya Pemahaman Masyarakat akan dampak Psikotropika.
- f) Belum Optimalnya Pengawasan Lembaga Asing dan Warga Negara Asing.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dari perkembangan sosial politik yang berkembang di Masyarakat Indonesia pada umumnya dan Provinsi Sulawesi Tengah pada khususnya, maka masalah-masalah yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan tugas, pokok dan fungsi dapat dirumuskan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah pada Bakesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah
Periode 2021-2026**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih Rendahnya Implementasi <i>Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya</i> (IPOLEKSOSBUD) di Lingkungan Masyarakat	Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan	Kecenderungan melemahnya komitmen terhadap Nilai-Nilai Pancasila dan Pengamalan Nilai-Nilai Konsensus Dasar Bernegara
			Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kewaspadaan Dini Masyarakat dan adanya ancaman radikalisme serta potensi gangguan kerawanan oleh pelaku aksi terrorisme
			Masih kurangnya Penguatan dan Pemberdayaan Ormas serta rendahnya pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing.
			Kurangnya pemahaman Masyarakat Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Kemasyarakatan sebagai kekuatan pemersatu Bangsa
			Masih banyaknya penyalahgunaan Narkoba
		Pendidikan Politik bagi Masyarakat yang belum Optimal	Masih rendahnya Pemahaman aspek-aspek Politik di Masyarakat

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Visi dan Misinya selama lima tahun ke depan (2021-2026) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visinya adalah : **“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”**

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut telah dituangkan kedalam Sembilan (9) Misi, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah Melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM.
3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.
5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.
6. Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam, Antar Sesama Manusia Sebagai Wujud Pembangunan Berkelanjutan.
7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan Maupun di Dalam Provinsi Sulteng dan di Luar Provinsi bertetangga.
8. Meningkatkan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan dan Kesehatan Berbasis pada Teknologi Informasi yang Integrasi dan Dijalankan Secara Sistimatis dan Digital.
9. Mendorong Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) agar Terjadi Percepatan Desentralisasi Pelayanan dan Peningkatan Lapangan Kerja dan Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah.

Dari misi yang tertuang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah secara langsung dan tidak langsung

mendukung semua misi yang tercantum, terutama pada Misi Kedua : **“Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM”**. Sebagai bahan Telaahan terhadap Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2021-2026 dilakukan identifikasi beberapa permasalahan, beserta faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah Telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2021-2026.

Tabel 3.2
Telaahan Visi dan Misi, KDH/WKDH

Visi : “Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”				
No	Misi/ KDH/WKDH	Tupoksi PD	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
	“Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM”	1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1. Adanya UU no. 23 Thn 2014 psl 25 dan 26 mengamanatkan penyusunan PP ttg pelaksanaan urusan pemerintahan umum (30 Mei 2016 di tunda pelaksanaannya)	1. Rendahnya Kepedulian Masyarakat terhadap ancaman disintegrasi Bangsa
		2. Peningkatan peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan pengembangan Etika serta Budaya Politik	2. Adanya PP no. 18 Thn 2016 ttg perangkat daerah yg dlm ketentuan peralihan pasal 122 diatur masa transisi kesbangpol tetap melaksanakan tugasnya dan dibiayai APBD	2. Masyarakat yang tidak ambil pusing (masa bodoh) dengan Kegiatan Perpolitikan
		3. Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	3. Adanya Permendagri no. 38 Thn 2018 ttg Pedoman Penyusunan APBD 2018 yg merupakan dasar pelaksanaan dan penganggaran program keg Bid. Kesatuan Bangsa dan Politik	3. Belum memberikan kontribusi maksimal keberadaan Ormas dan LSM

		4. Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	4. Adanya Surat edaran Mendagri Tgl. 30 Okt 2017 no. 050.12/7765/SJ ttg penyusunan program bid. Kesatuan bangsa dan politik dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang bela negara serta kurangnya pengetahuan tentang Nilai-Nilai sejarah Kebangsaan
		5. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	5. Adanya Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 100 - 440 dan 100 - 441 Tahun 2019	5. Masih adanya isu SARA yg berpotensi Konflik

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

Di samping memastikan sinkronisasi dengan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sudah seharusnya memiliki keterkaitan dengan Visi dan Misi Presiden. Visi Misi Presiden dijabarkan oleh Kementerian/Lembaga yang dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri, untuk itu sangat perlu memperhatikan Permendagri No. 67 Tahun 2020 tentang Renstra Kementrian Dalam Negeri Tahun 2019-2024.

Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum mempunyai tujuan strategis, yaitu Terwujudnya Stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa, keterkaitan Pencapaian Tujuan dan Sasaran dengan kebutuhan Kelembagaan.

Tabel 3.3
Telaahan Tujuan/Sasaran K/L

Tujuan : "Terwujudnya Stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa"				
No	Sasaran K/L	Tupoksi PD	Faktor	
			Pengdorong	Penghambat
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1	Meningkatkan Kualitas Demokrasi Indonesia	1. Peningkatan peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan pengembangan Etika serta Budaya Politik	1. Adanya UU no. 23 Thn 2014 psl 25 dan 26 mengamanatkan penyusunan PP ttg pelaksanaan urusan pemerintahan umum (30 Mei 2016 di tunda pelaksanaannya)	1. Masyarakat yang tidak ambil pusing (masa bodoh) dengan Kegiatan Perpolitikan
2	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	2. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2. Adanya PP no. 18 Thn 2016 ttg perangkat daerah yg dlm ketentuan peralihan pasal 122 diatur masa transisi kesbangpol tetap melaksanakan tugasnya dan dibiayai APBD	2. Rendahnya Kepedulian Masyarakat terhadap ancaman disintegrasi Bangsa
3	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional	3. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	3. Adanya Permendagri no. 38 Thn 2018 ttg Pedoman Penyusunan APBD 2018 yg merupakan dasar pelaksanaan dan penganggaran program keg Bid. Kesatuan Bangsa dan Politik	3. Masih adanya isu SARA yg berpotensi Konflik
		4. Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	4. Adanya Surat edaran Mendagri Tgl. 30 Okt 2017 no. 050.12/7765/SJ ttg penyusunan program bid. Kesatuan bangsa dan politik dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang bela negara serta kurangnya pengetahuan tentang Nilai-Nilai sejarah Kebangsaan
		5. Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	5. Adanya Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 100 - 440 dan 100 - 441 Tahun 2019	5. Belum memberikan kontribusi maksimal keberadaan Ormas dan LSM

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada RPJMD

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, terkait dengan Telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah tidak memiliki Program dan Kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Telaahan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Telaahan Renstra Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2019-2024 maka dapat dirumuskan isu-isu strategis Pembangunan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah untuk 5 (lima) Tahun ke depan, yaitu :

- a. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
- b. Pemenuhan SDM dan anggaran yang memadai;
- c. Optimalisasi Deteksi dan Kewaspadaan Dini terhadap Potensi Instabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum;
- d. Pemantapan Wawasan Kebangsaan, Ideologi Pancasila dan Kewaspadaan Nasional, Pembauran Kebangsaan, kesadaran dan

- kemampuan bela negara, serta wawasan Ketahanan Ekonomi , Politik, Sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
- e. Penguatan peran Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah dalam memberikan Pendidikan Politik bagi Masyarakat;
 - f. Optimalisasi peran dan Fasilitasi Forum dan Lembaga Kemitraan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi. Dengan berlandaskan Misi yang telah ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun Tahun 2021-2026 menetapkan tujuan : ***“Mewujudkan Kondusifitas Daerah melalui Penguatan Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya (Ipoleksosbud)”***.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan Program dan Kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada Tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan tingkat capaiannya (target yang

direncanakan). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/Tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra.

Dalam penentuan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, disusun Cascading (pohon kinerja) yang merupakan sebuah proses penjabaran dari Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Tengah, serta tujuan dan sasaran pembangunan kedalam Tujuan, Sasaran, dan Program Perangkat Daerah dengan menggunakan kerangka logis sehingga menjadi lebih rinci dan terbagi habis. Dengan kata lain adanya Cascading tersebut, tumpang tindih tugas dan kewenangan pada setiap jenjang jabatan dapat dihindari. Adapun Cascading Pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah disajikan pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.1
Cascading Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

PROGRAM : PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Indikator : Jumlah Dokumen Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan

5 Sub Kegiatan

Sub Kegiatan : Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan

Indikator : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun

Sub Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan

Indikator : Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan

Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan

Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan

Indikator : Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

PROGRAM : PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Indikator : Jumlah Dokumen Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik

5 Sub Kegiatan :

Sub Kegiatan : Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Indikator : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun

Sub Kegiatan : Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Indikator : Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Indikator : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

PROGRAM : PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan A

Indikator : Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

5 Sub Kegiatan :

Sub Kegiatan : Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Indikator : Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun

Sub Kegiatan : Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Indikator : Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Indikator : Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Indikator : Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

5 Sub Kegiatan :

Sub Kegiatan : Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Indikator : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun

Sub Kegiatan : Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Indikator : Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Indikator : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

PROGRAM : PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Kegiatan : Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

6 Sub Kegiatan :

Sub Kegiatan : Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Indikator : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun

Indikator : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun

Sub Kegiatan : Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Indikator : Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang disusun

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Indikator : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, serta Penanganan Konflik di Daerah

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Indikator : Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Indikator : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi



Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu Tahun 2021-2026, Pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah beserta indikator kerjanya dapat dijelaskan dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator (Tujuan/Sasaran)	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke:				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Mewujudkan Kondusifitas Daerah melalui Penguatan Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya (Ipoleksosbud)	Meningkatnya penerapan hasil pembinaan kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	76,50	76,80	77,10	77,15	77,20

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Tengah

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, dan misi organisasi. Penjabaran selanjutnya adalah berupa Program, yaitu berupa kumpulan Kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan lingkungan yang ada, Strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai berikut :

1. Memantapkan pelaksanaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
2. Memantapkan Pelaksanaan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi;
3. Merumuskan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;

4. Merumuskan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya;
5. Peningkatan Kewaspadaan Dini dan penanganan konflik social sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (Program dan Kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan Program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta Visi dan Misi Instansi Pemerintah. Oleh karena itu Kebijakan yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dirumuskan sebagai berikut :

1. Penyusunan Program dan Kebijakan Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara;
2. Koordinasi dan Monev Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
3. Menyusun kebijakan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Pemantauan Situasi Politik di Daerah;
4. Melaksanakan Koordinasi Pendidikan Politik, Partai Politik dan Pemilu;
5. Menyusun Kebijakan dan Pemberdayaan Ormas
6. Melaksanakan Monev Pemberdayaan dan Mediasi Sengketa Ormas;
7. Memfasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Kerukunan Umat Beragama ;

8. Melaksanakan Koordinasi Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya;
9. Optimalisasi dan Penggunaan Media Sosial untuk melakukan sosialisasi dan meredam konflik di masyarakat;
10. Penguatan Tim Pengawasan Orang Asing dengan Instansi Terkait dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum;

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima Tahun mendatang, yaitu dari Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2021-2026

VISI : Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju AM				
MISI 2 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan, Hukum dan HAM				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Mewujudkan Kondusifitas Daerah melalui Penguatan Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya (IPOLEKSOSBUD)	- Terwujudnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Memantapkan Pelaksanaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	1. Penyusunan Program dan Kebijakan Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	
			2. Koordinasi dan Monev Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	
		Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3. Penyusunan Program dan Kebijakan Bidang Kewaspadaan	
			4. Koordinasi dan Monev dalam Penanganan Konflik	
		Merumuskan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	5. Menyusun Kebijakan dan Pemberdayaan Ormas	
			6. Melaksanakan Monev Pemberdayaan dan Mediasi Sengketa Ormas	
		Merumuskan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya	7. Menfasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Kerukunan Umat Beragama	
			8. Melaksanakan Koordinasi Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya	
	- Meningkatkan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik	Memantapkan Pelaksanaan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi		9. Menyusun kebijakan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Pemantauan Situasi Politik di Daerah
				10. Melaksanakan Koordinasi Pendidikan Politik, Partai Politik dan Pemilu

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 terdapat 6 (enam) Program, sebagaimana berikut :

6.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Indikator kinerja program atau outcome adalah Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, dengan kegiatan dan output atau indikator Kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Ketatausahaan dan Kepegawaian.
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Ketatausahaan dan Kepegawaian.
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Ketatausahaan dan Kepegawaian.

- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah.

- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Ketatausahaan dan Kepegawaian.

- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Ketatausahaan dan Kepegawaian.

6.1.2 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Indikator kinerja program atau outcome adalah Persentase Generasi Muda yang diberikan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, serta dengan kegiatan dan output atau indikator kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
- Indikator keluaran dan kegiatan ini adalah Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

6.1.3 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Indikator kinerja program atau outcome adalah Peningkatan Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Tengah, dengan kegiatan dan output atau indikator kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
- Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik.

6.1.4 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Indikator kinerja program atau outcome adalah Persentase Peningkatan jumlah Ormas yang terdaftar pada Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan kegiatan dan output atau indikator kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

6.1.5 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Indikator kinerja program atau outcome adalah Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan kegiatan dan output atau indikator kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

6.1.6 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Indikator kinerja program atau outcome adalah Persentase Pembinaan Kewaspadaan Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Konflik Sosial di Daerah, serta dengan kegiatan dan output atau indikator kegiatan sebagai berikut:

- Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
- Indikator keluaran dan kegiatan ini adalah Meningkatnya Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.

Pada bagian ini dikemukakan rencana Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOMES), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Penanggungjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	Rp.		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			17,154,389		18,439,350,000		17,742,730,000		20,460,360,000		14,016,900,000		18,319,160,000		18,319,160,000		
		8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks RB Perangkat Daerah	Indeks	7,964,155	64.50	8,717,980,000	66.50	15,184,500,000	68.50	17,354,830,000	70.00	12,226,710,000	71.00	15,855,760,000	71.00	15,855,760,000	Sekretariat	
		8.01.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	Nilai	134,764	73	151,266,703	75	475,000,000	80	600,000,000	83	350,000,000	86	475,000,000	86	475,000,000	Sekretariat	Prov. Sulteng
		8.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2,220.00	3	4,879,825	3	15,000,000	3	20,000,000	3	10,000,000	3	15,000,000	3	15,000,000	Sekretariat	Prov. Sulteng
		8.01.01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2,125.00	2	4,393,575	1	15,000,000	1	20,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	Sekretariat	Prov. Sulteng
		8.01.01.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	570.000	0	-	1	15,000,000	1	20,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	Sekretariat	Prov. Sulteng
		8.01.01.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	570.000	2	2,743,575	1	15,000,000	1	20,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	Sekretariat	Prov. Sulteng



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOMES), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Penanggungjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	Rp.		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		8.01.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	475.000	0	-	1	15,000,000	1	20,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	Sekretariat	Prov. Sulteng
		8.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15,480.000	1	18,276,750	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	Sekretariat	Prov. Sulteng
		8.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	113,324.000	1	120,972,978	1	350,000,000	1	450,000,000	1	250,000,000	1	350,000,000	1	350,000,000	Sekretariat	Prov. Sulteng
		8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah	Perentase	6,568,239.000	97,50	7,456,461,671	97,50	9,684,500,000	60	11,374,830,000	97,50	8,896,710,000	97,50	10,030,760,000	97,50	10,030,760,000	Sekretariat	Sekretariat
		8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	5,371,320.000	14	6,239,985,196	14	7,369,500,000	14	8,369,500,000	14	6,894,500,000	14	7,715,760,000	14	7,715,760,000	Sekretariat	Prov. Sulteng
		8.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1,175,332.000	12	1,147,200,000	12	2,100,000,000	12	2,780,330,000	12	1,857,210,000	12	2,100,000,000	12	2,100,000,000	Sekretariat	Prov. Sulteng
		8.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	5,817.000	0	-	1	15,000,000	1	15,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	Sekretariat	Prov. Sulteng
		8.01.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	760.000	0	-	1	15,000,000	1	15,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	Sekretariat	Prov. Sulteng

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOMES), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Penanggungjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	Rp.		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		8.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	10,000.000	1	58,918,000	1	150,000,000	1	150,000,000	1	100,000,000	1	150,000,000	1	150,000,000	Sekretariat	Prov. Sulteng
		8.01.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2,220.000	0	-	1	5,000,000	1	15,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	Sekretariat	Prov. Sulteng
		8.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1,140.000	4	7,164,900	1	15,000,000	1	15,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	Sekretariat	Prov. Sulteng
		8.01.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1,650.000	1	3,193,575	1	15,000,000	1	15,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	Sekretariat	Prov. Sulteng
		8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	40,450.000	2	60,276,150	4	190,000,000	4	240,000,000	4	130,000,000	4	190,000,000	4	190,000,000	Sekretariat	Sekretariat
		8.01.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2,125.000	0	-	1	15,000,000	1	15,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	Sekretariat	Prov. Sulteng
		8.01.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	475.000	0	-	1	15,000,000	1	15,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	Sekretariat	Prov. Sulteng



		8.01.01.1 .03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	Lapora n	11,900.0 00	1	56,932,57 5	1	150,000,0 00	1	200,000,0 00	1	100,000,0 00	1	150,000,0 00	1	150,000,0 00	Sekretar iat	Prov. Sulten g
--	--	---------------------	--	--	-------------	----------------	---	----------------	---	-----------------	---	-----------------	---	-----------------	---	-----------------	---	-----------------	-----------------	----------------------



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOMES), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Penanggungjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	Rp.		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Milik Daerah pada SKPD	Milik Daerah pada SKPD																
		8.01.01.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	25,950.000	1	3,343,575	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	Sekretariat	Prov. Sulteng
		8.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	Indeks	32,870.000	80	32,789,750	85	515,000,000	60	540,000,000	90	335,000,000	92	540,000,000	92	540,000,000	Sekretariat	Sekretariat
		8.01.01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0	-	1	300,000,000	1	300,000,000	1	175,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	Sekretariat	Prov. Sulteng
		8.01.01.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen		0	-	1	15,000,000	1	15,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	Sekretariat	Prov. Sulteng
		8.01.01.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		0	-	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	Sekretariat	Prov. Sulteng
		8.01.01.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	32,869.750	1	32,789,750	1	150,000,000	1	175,000,000	1	100,000,000	1	175,000,000	1	175,000,000	Sekretariat	Prov. Sulteng
		8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks pelayanan publik (IPP) Perangkat Daerah	Laporan	310,364.000	6	237,528,901	6	745,000,000	60	750,000,000	6	515,000,000	6	745,000,000	6	745,000,000	Sekretariat	Sekretariat
		8.01.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8,182.000	1	7,012,401	1	15,000,000	1	20,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	Sekretariat	Prov. Sulteng
		8.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	115,254.000	1	14,578,500	1	30,000,000	1	30,000,000	1	20,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	Sekretariat	Prov. Sulteng
		8.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	60,048.000	1	60,047,750	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	1	100,000,000	Sekretariat	Prov. Sulteng



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOMES), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Penanggungjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	Rp.		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Penggandaan yang Disediakan																
		8.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	15,120.000	1	29,820,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	30,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	Sekretariat	Prov. Sul teng
		8.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	11,625.000	1	19,350,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	Sekretariat	Prov. Sul teng
		8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100,135.000	1	106,720,250	1	500,000,000	1	500,000,000	1	300,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	Sekretariat	Prov. Sul teng
		8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Tata kelola PBJ Perangkat Daerah	Laporan	168,685.000	1	100,980,000	3	1,550,000,000	60	1,725,000,000	2	200,000,000	4	1,725,000,000	4	1,725,000,000	Sekretariat	Sekretariat
		8.01.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		0	-	2	500,000,000	2	500,000,000	1	50,000,000	1	400,000,000	1	500,000,000	Sekretariat	Prov. Sul teng
		8.01.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		0	-	0	-	0	-	0	-	3	100,000,000	3	-	Sekretariat	Prov. Sul teng
		8.01.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		0	-	0	-	1	175,000,000	0	-	1	175,000,000	1	175,000,000	Sekretariat	Prov. Sul teng
		8.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	168,685.000	5	100,980,000	5	300,000,000	5	300,000,000	5	150,000,000	5	300,000,000	5	300,000,000	Sekretariat	Prov. Sul teng
		8.01.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0	-	1	750,000,000	1	750,000,000	0	-	0	-	0	-	Sekretariat	Prov. Sul teng



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOMES), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Penanggungjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	Rp.		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		8.01.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0	-	0	-	0	-	0	-	1	750,000,000	1	750,000,000	Sekretariat	Prov. Sulteng
		8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat digitalisasi arsip perangkat daerah	Laporan	241,519	14	230,851,825	15	475,000,000	62	475,000,000	15	475,000,000	15	475,000,000	15	475,000,000	Sekretariat	Sekretariat
		8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,481.000	0	-	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	Sekretariat	Prov. Sulteng
		8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	76,035.000	12	77,062,000	12	150,000,000	12	150,000,000	12	150,000,000	12	150,000,000	12	150,000,000	Sekretariat	Prov. Sulteng
		8.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	19,786.000	1	21,820,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	Sekretariat	Prov. Sulteng
		8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	133,217.000	1	131,969,825	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	Sekretariat	Prov. Sulteng
		8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tingkat Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	467,265.000	3	447,825,000	3	1,550,000,000	3	1,650,000,000	4	1,325,000,000	4	1,675,000,000	4	1,675,000,000	Sekretariat	Sekretariat
		8.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	203,980.000	33	301,975,000	33	1,000,000,000	33	1,100,000,000	33	1,000,000,000	33	1,100,000,000	33	1,100,000,000	Sekretariat	Prov. Sulteng



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOMES), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Penanggungjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	Rp.		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		8.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	144,241.000	40	25,350,000	40	50,000,000	40	50,000,000	40	50,000,000	40	75,000,000	40	75,000,000	Sekretariat	Prov. Sulteng
		8.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	25,875.000	1	120,500,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	175,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	Sekretariat	Prov. Sulteng
		8.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	93,170.000	0	-	0	-	0	-	1	100,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	Sekretariat	Prov. Sulteng
Mewujudkan Kondusifitas Daerah melalui Penguatan Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya (IPOLEKS OSBUD)	Meningkatnya penerapan Hasil pembinaan, kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang mendapatkan layanan pembinaan Ideologi Pancasila dan Wasbang	Persentase	401,878.000	20	459.40	40	459.43	60	376.99	80	442.02	100	544.51	100	544.51	Bid. Wawasan Kebangsaan	Prov. Sulteng
		8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase SMA/SMK, Perguruan tinggi dan organisasi kepemudaan yg terbina ideologi dan wasbang	Dokumen	401,878.000	5	459,400,000	5	344,430,000	60	376,990,000	5	442,020,000	5	544,510,000	5	544,510,000	Bid. Wawasan Kebangsaan	Prov. Sulteng
		8.01.02.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	Dokumen	4,538.000	1	3,365,500	1	3,500,000	1	3,500,000	1	5,000,000	1	8,000,000	5	8,000,000	Bid. Wawasan Kebangsaan	Prov. Sulteng



Bhineka Tunggal

Bhineka Tunggal



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOMES), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Penanggungjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	Rp.		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun																
		8.01.02.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	-	1	6,376,000	1	6,500,000	1	6,500,000	1	7,000,000	1	10,000,000	5	10,000,000	Bid. Wawasan Kebangsaan	Prov. Sulteng
		8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	153,897.000	100	128,543,725	100	110,000,000	100	115,000,000	100	125,000,000	100	155,000,000	100	155,000,000	Bid. Wawasan Kebangsaan	Prov. Sulteng
		8.01.02.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	86,821.000	150	136,013,150	150	120,000,000	150	125,000,000	150	130,000,000	150	170,000,000	150	170,000,000	Bid. Wawasan Kebangsaan	Prov. Sulteng
		8.01.02.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter	Laporan	156,622.000	4	185,101,625	4	64,430,000	4	76,990,000	4	115,020,000	4	131,510,000	4	131,510,000	Bid. Wawasan Kebangsaan	Prov. Sulteng



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOMES), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Penanggungjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	Rp.		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																
		8.01.02.1.01.06	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	-	0	-	30	40.000.000	35	50.000.000	40	60.000.000	45	70.000.000	45	70.000.000	Bid. Wawasan Kebangsaan	Prov. Sulteng
Mewujudkan Kondusifitas Daerah melalui Penguatan Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya (IPOLEKS OSBUD)	Meningkatkan hasil pembinaan kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	persentase kelompok masyarakat yang meningkatkan literasi politik	Persentase	2,161,849.000	20	2,671.87	40	1,390.36	60	1,627.26	80	507.75	100	598.41		598.41	Bid. Politik	Prov. Sulteng
		8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	persentase meningkatnya pemahaman politik bagi parpol	Dokumen	2,161,849.000	5	2,671,870,000	5	1,390,360,000	5	1,627,260,000	5	507,750,000	5	598,410,000	5	598,410,000	Bid. Politik	Prov. Sulteng



				Persentase meningkatnya pemahaman politik bagi Ormas															
				Persentase meningkatnya pemahaman politik bagi Pemilih pemula															
				Persentase meningkatnya pemahaman politik bagi organisasi dan kelompok perempuan															





TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOMES), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Penanggungjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	Rp.		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik																	
		8.01.03.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	3,760.000	1	3,049,000	1	3,500,000	1	4,000,000	1	3,050,000	1	3,500,000	5	3,500,000	Bid. Politik	Prov. Sulteng
		8.01.03.1.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	6,260.000	1	5,549,000	1	6,000,000	1	6,500,000	1	5,600,000	1	6,000,000	5	6,000,000	Bid. Politik	Prov. Sulteng



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOMES), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Penanggungjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	Rp.		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	1,800,511.000	40	2,203,223,000	40	910,860,000	40	1,136,760,000	40	50,000,000	40	50,000,000	40	50,000,000	Bid. Politik	Prov. Sulteng
		8.01.03.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	98,172.000	120	243,816,000	120	250,000,000	120	255,000,000	120	234,100,000	120	250,000,000	120	250,000,000	Bid. Politik	Prov. Sulteng
		8.01.03.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	Laporan	253,146.000	4	216,233,000	4	220,000,000	4	225,000,000	4	215,000,000	4	288,910,000	4	288,910,000	Bid. Politik	Prov. Sulteng



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOMES), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Penanggungjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	Rp.		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																
Mewujudkan Kondusifitas Daerah melalui Penguatan Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya (IPOLEKS OSBUD)		8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi msy yang aktif	Perse ntase	5,802,793.000	100	5,720.090.000	100	247.300.000	100	510.880.000	100	254.730.000	100	409.660.000	100	409.660.000	Bid. Ketahan an Ekono mi	Prov. Sulte ng
		8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang terbina	perse ntase	5,802,793.000	5	5,720,090,000	5	247,300,000	100	510,880,000	5	254,730,000	5	409,660,000	5	409,660,000	Bid. Ketaha nan Ekono mi	Prov. Sulte ng
		8.01.04.1.01.01	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Doku men	4,129.000	1	3,324,000	1	3,400,000	1	5,500,000	1	3,400,000	1	4,000,000	5	4,000,000	Bid. Ketahan an Ekonom i	Prov. Sulten g



		8.01.04.1 .01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas,	Doku men	3,816.00 0	1	3,010,500	1	3,100,000	1	5,000,000	1	3,100,000	1	5,000,000	5	5,000,000	Bid. Ketahan an	Prov. Sulten g
--	--	---------------------	---	--	-------------	---------------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	-----------------------	----------------------



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOMES), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Penanggungjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	Rp.		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun															Ekonomi	
		8.01.04.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	5,455,642.000	60	5,436,709,900	60	100,000,000	60	150,000,000	60	100,000,000	60	135,000,000	60	135,000,000	Bid. Ketahanan Ekonomi	Prov. Sulteng
		8.01.04.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	-	60	142,195,975	60	80,000,000	60	175,000,000	60	80,000,000	60	150,000,000	60	150,000,000	Bid. Ketahanan Ekonomi	Prov. Sulteng
		8.01.04.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	339,207.000	4	134,849,625	4	60,800,000	4	175,380,000	4	68,230,000	4	115,660,000	20	115,660,000	Bid. Ketahanan Ekonomi	Prov. Sulteng
	Meningkatnya penerapan hasil	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	persentase kelompok masyarakat yang meningkat	Perentase	205,904.000	20	338.010.000	40	219.330.000	60	225.070.000	80	227.080.000	100	346.740.000	100	346.740.000	Bid. Ketahanan	Prov. Sulteng



pembinaan kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi				kapasitasnya mengenai ketahanan ekonomi, sosial dan budaya																
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOMES), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Penanggungjawab	LOKASI	
							2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	Rp.			
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				Ekonomi, Sosial dan Budaya																Ekonomi	
		8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase kelompok masyarakat yang terbina ketahanan ekonomi	persentase	205,904.000	5	338,010,000	5	219,330,000	100	225,070,000	5	227,080,000	5	346,740,000	5	346,740,000		Bid. Ketahanan Ekonomi	Bid. Ketahanan Ekonomi
				Persentase sekolah yang terbina ketahanan sosial dan budaya																	
		8.01.05.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen	3,843.000	1	2,892,800	1	2,892,800	1	2,892,800	1	2,892,800	1	3,500,000	1	3,500,000		Bid. Ketahanan Ekonomi	Prov. Sulteng



		8.01.05.1 .01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Doku men	3,843.00 0	1	3,038,000	1	3,038,000	1	3,038,000	1	3,038,000	1	4,000,000	1	4,000,000	Bid. Ketahan an Ekonom i	Prov. Sulten g
--	--	---------------------	---	---	-------------	---------------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	--------------------------------------	----------------------



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOMES), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Penanggungjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	Rp.		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		8.01.05.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	55,985.000	60	72,583,950	60	80,000,000	60	80,000,000	60	85,000,000	60	100,000,000	60	100,000,000	Bid. Ketahanan Ekonomi	Prov. Sulteng
		8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	65,525.000	60	63,571,900	60	75,000,000	60	80,000,000	60	90,000,000	60	125,000,000	60	125,000,000	Bid. Ketahanan Ekonomi	Prov. Sulteng
		8.01.05.1.01.01	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	76,708.000	4	195,923,350	4	58,399,200	4	59,139,200	4	46,149,200	4	114,240,000	4	114,240,000	Bid. Ketahanan Ekonomi	Prov. Sulteng



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOMES), KEGIATAN PROGRAM (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Penanggungjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	Rp.		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Mewujudkan Kondusifitas Daerah melalui Penguatan Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya (IPOLEKS OSBUD)	Meningkatnya penerapan hasil pembinaan kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase peningkatan kewaspadaan daerah dalam pencegahan konflik sosial	Perse ntase	617,810.000	20	532.000.000	40	356.810.000	100	365.340.000	80	358.610.000	100	564.070.000	100	564.070.000	Bid. Kewaspadaan	Prov. Sulteng
		8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase peningkatan perangkat aparatur dan tokoh masyarakat yang terbina kewaspadaan daerahnya	perse ntase	617,810.000	5	532,000,000	5	356,810,000	100	365,340,000	5	358,610,000	5	564,070,000	5	564,070,000	Bid. Kewaspadaan	Prov. Sulteng
		8.01.06.1.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Doku men	2,894.000	1	4,536,525	1	2,000,000	1	2,500,000	1	2,000,000	1	3,000,000	1	3,000,000	Bid. Kewaspadaan	Prov. Sulteng



		8.01.06.1 .01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga	Doku men	43,765.0 00	4	19,216,02 5	4	20,000,00 0	4	25,000,00 0	4	20,000,00 0	4	35,000,00 0	4	35,000,00 0	Bid. Kewasp adaan	Prov. Sulten g
--	--	---------------------	---	---	-------------	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	----------------	-------------------------	----------------------



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOMES), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Penanggungjawab	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	Rp.		
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun																
		8.01.06.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	40,400.000	130	86,773,850	130	40,000,000	130	45,000,000	130	40,000,000	130	90,000,000	130	90,000,000	Bid. Kewaspadaan	Prov. Sulteng
		8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	252,810.000	150	144,859,975	150	120,000,000	150	130,000,000	150	140,000,000	150	170,000,000	150	170,000,000	Bid. Kewaspadaan	Prov. Sulteng



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOMES), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN TAHUN 2021	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Penanggungjawab	LOKASI	
							2022		2023		2024		2025		2026		TARGET	Rp.			
							TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		8.01.06.1.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	186,169.000	4	167,745,450	4	140,000,000	4	130,000,000	4	120,000,000	4	150,000,000	4	150,000,000	4	Bid. Kewaspadaan	Prov. Sulteng
		8.01.06.1.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen	91,772.000	4	108,868,175	4	34,810,000	4	32,840,000	4	36,610,000	4	116,070,000	4	116,070,000	4	Bid. Kewaspadaan	Prov. Sulteng

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 berikut.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tengah Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)			76,50	76,80	77,10	77,15	77,20	77,20

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Penjelasan																												
1	2	3	4	5																												
	Meningkatnya penerapan hasil pembinaan kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Jumlah Aspek dibagi Jumlah Total Aspek	<p>Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan atas 3 (tiga) aspek, 11 (sebelas) variabel dan 28 (dua puluh delapan) indikator. Aspek, Variabel dan Indikator tersebut adalah :</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Aspek</th> <th>Variabel</th> <th>Indikator</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Kebebasan Sipil</td> <td>1. Kebebasan berkumpul dan berserikat</td> <td>2 indikator</td> </tr> <tr> <td>2. Kebebasan berpendapat</td> <td>2 indikator</td> </tr> <tr> <td>3. Kebebasan berkeyakinan</td> <td>3 indikator</td> </tr> <tr> <td>4. Kebebasan dan diskriminasi</td> <td>3 indikator</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Hak-hak Politik</td> <td>5. Hak memilih dan dipilih</td> <td>5 indikator</td> </tr> <tr> <td>6. Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan</td> <td>2 indikator</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Lembaga Demokrasi</td> <td>7. Pemilu yang bebas dan adil</td> <td>2 indikator</td> </tr> <tr> <td>8. Peran DPRD</td> <td>3 indikator</td> </tr> <tr> <td>9. Peran Partai Politik</td> <td>2 indikator</td> </tr> <tr> <td>10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah</td> <td>2 indikator</td> </tr> <tr> <td>11. Peradilan yang Independen</td> <td>2 indikator</td> </tr> </tbody> </table>	Aspek	Variabel	Indikator	Kebebasan Sipil	1. Kebebasan berkumpul dan berserikat	2 indikator	2. Kebebasan berpendapat	2 indikator	3. Kebebasan berkeyakinan	3 indikator	4. Kebebasan dan diskriminasi	3 indikator	Hak-hak Politik	5. Hak memilih dan dipilih	5 indikator	6. Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan	2 indikator	Lembaga Demokrasi	7. Pemilu yang bebas dan adil	2 indikator	8. Peran DPRD	3 indikator	9. Peran Partai Politik	2 indikator	10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	2 indikator	11. Peradilan yang Independen	2 indikator
Aspek	Variabel	Indikator																														
Kebebasan Sipil	1. Kebebasan berkumpul dan berserikat	2 indikator																														
	2. Kebebasan berpendapat	2 indikator																														
	3. Kebebasan berkeyakinan	3 indikator																														
	4. Kebebasan dan diskriminasi	3 indikator																														
Hak-hak Politik	5. Hak memilih dan dipilih	5 indikator																														
	6. Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan	2 indikator																														
Lembaga Demokrasi	7. Pemilu yang bebas dan adil	2 indikator																														
	8. Peran DPRD	3 indikator																														
	9. Peran Partai Politik	2 indikator																														
	10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	2 indikator																														
	11. Peradilan yang Independen	2 indikator																														

BAB VIII PENUTUP

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 merupakan suatu rencana yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima Tahun ke depan dan digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pembuatan kebijakan, program dan kegiatan. Renstra ini disusun dengan memperhatikan perkembangan situasi, kondisi, dan potensi yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Sulawesi Tengah secara khusus dan kondisi, situasi, dan potensi yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya.

Hasil pelaksanaan dari Renstra akan menjadi tolok ukur keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan pencapaian sasaran yang diinginkan. Tolok ukur ini terlihat dari laporan kinerja yang disampaikan pada akhir Tahun anggaran melalui penilaian realisasi kinerja program/kegiatan.

Selanjutnya Renstra ini merupakan pedoman dalam menyusun Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang setiap Tahunnya akan diadakan evaluasi untuk penyempurnaan atau penyesuaian karena adanya tuntutan perubahan sesuai situasi dan kondisi yang berkembang. Dengan disusunnya Renstra ini, diharapkan upaya-upaya pembangunan di Bidang kesatuan bangsa dan politik akan semakin terarah dan meningkat, dalam mendukung visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Kedepannya, diharapkan Rencana Starategis ini dapat dijalankan sesuai rencana dan didukung oleh seluruh Sumber Daya Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara umum.